

Krisis Etika Komunikasi di Media Sosial: Analisis Multidisipliner terhadap Peran Algoritma, Literasi Digital, dan Regulasi dalam Mewujudkan Ruang Publik Digital yang Bertanggung Jawab

Amril¹, Hasan Sazali^{2*}

^{1,2*} Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: amril@gmail.com¹, hasansazali@uinsu.ac.id^{2*}

Histori Artikel:

Dikirim 10 Maret 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 30 April 2025; *Diterima* 10 Mei 2025; *Diterbitkan* 30 Mei 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMKI Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Krisis etika komunikasi di media sosial merupakan fenomena kontemporer yang kompleks dan sistemik, dipicu oleh lemahnya literasi digital, pengabaian terhadap netiquette, dan dominasi algoritma platform digital. Artikel ini menganalisis secara multidisipliner bagaimana struktur digital, budaya viralitas, dan minimnya regulasi berkontribusi terhadap maraknya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan perilaku komunikasi agresif di ruang publik digital. Melalui pendekatan kualitatif dan observasi terhadap platform TikTok, Instagram, dan X (Twitter), penelitian ini menemukan bahwa perilaku komunikasi destruktif tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam ekosistem digital yang permisif. Algoritma memperkuat konten ekstrem demi keterlibatan emosional, sementara pengguna terbiasa dengan validasi sosial yang mendorong ekspresi tanpa refleksi. Lemahnya regulasi dan rendahnya pendidikan etika digital turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan strategi integratif berupa resistensi algoritmik, reformasi regulasi, dan penguatan literasi etika digital berbasis kolaborasi antara pemerintah, platform, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan ruang digital dapat menjadi lebih etis, inklusif, dan bertanggung jawab sebagai representasi peradaban komunikasi modern.

Kata Kunci: Etika Komunikasi; Media Sosial; Literasi Digital; Algoritma; Regulasi.

Abstract

This The crisis of communication ethics in social media is a complex and systemic contemporary phenomenon, triggered by weak digital literacy, neglect of netiquette, and the dominance of digital platform algorithms. This article analyzes in a multidisciplinary manner how digital structure, virality culture, and lack of regulation contribute to the rise of hate speech, the spread of hoaxes, and aggressive communication behavior in the digital public space. Through a qualitative approach and observation of the platforms TikTok, Instagram, and X (Twitter), this study found that destructive communication behaviors do not stand alone, but rather reinforce each other in a permissive digital ecosystem. The algorithm amplifies extreme content for the sake of emotional engagement, while users are accustomed to social validation that encourages expression, without reflection. Weak regulations and low digital ethics education have also exacerbated this condition. Therefore, this article recommends integrative strategies in the form of algorithmic resistance, regulatory reform, and strengthening digital ethical literacy based on collaboration between governments, platforms, academics, and civil society. With this holistic approach, it is hoped that the digital space can become more ethical, inclusive, and responsible as a representation of modern communication civilization.

Keyword: Communication Ethics; Social Media; Digital Literacy; Algorithms; Regulation.

1. Pendahuluan

Media sosial telah menjadi ruang utama dalam berkomunikasi, namun kehadirannya juga membawa tantangan baru dalam aspek etika komunikasi. Fenomena seperti ujaran kebencian, hinaan, dan penyebaran informasi palsu mencerminkan krisis nilai yang semakin menguat di ruang digital, sebagaimana dikemukakan Fahrimal (2018), media sosial berpotensi menjadi ruang konflik bila pengguna tidak memahami dan menerapkan prinsip etika komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar sarana berbagi informasi, tetapi juga cerminan kualitas interaksi masyarakat dalam kehidupan nyata. Menurut Prabowo *et al.* (2021), banyak pengguna terutama remaja yang merasa bebas mengekspresikan pendapat tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Perilaku seperti ini menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap netiquette, yaitu etika dalam berkomunikasi secara digital. Sejalan dengan Ulfa *et al.* (2024), ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap norma komunikasi telah memicu meningkatnya perilaku verbal agresif dan kesalahpahaman di media sosial, yang berdampak pada melemahnya kohesi sosial. Tantangan terbesar dalam mengatasi krisis etika komunikasi ini terletak pada kurangnya pendidikan literasi digital yang menekankan pentingnya nilai moral dalam bermedia. Menurut Parlindungan *et al.* (2023), literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga mencakup penanaman sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu ada integrasi pendidikan etika dalam pembelajaran formal maupun nonformal untuk membentuk karakter pengguna media sosial yang bijak dan reflektif. Media sosial juga berperan membentuk budaya komunikasi baru yang kadang melenceng dari norma. Menurut Aulia *et al.* (2023), konten di platform seperti TikTok sering kali menampilkan komunikasi yang kasar dan tidak santun, yang secara tidak langsung memengaruhi pola komunikasi remaja. Fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis etika komunikasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh media, kebebasan berekspresi, dan lemahnya regulasi sosial dalam ruang digital yang terus berkembang.

Salah satu penyebab utama terjadinya krisis etika komunikasi di media sosial adalah kurangnya literasi digital yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan Zonyfar *et al.* (2022) yang mengemukakan bahwa banyak pengguna yang hanya menguasai aspek teknis dalam menggunakan media digital, namun minim pemahaman terhadap nilai-nilai etika di baliknya. Akibatnya, interaksi digital sering kali dilakukan tanpa kontrol moral yang cukup, sehingga rentan terjadi pelanggaran norma sosial. Ia menegaskan bahwa tanpa pembekalan literasi yang menyeluruh, pengguna cenderung memosisikan media sosial sebagai ruang lepas kendali yang bebas dari tanggung jawab komunikasi. Platform digital memberi ruang luas bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Namun, menurut Ihsani & Febriyanti (2021), kebebasan tersebut sering disalahartikan sebagai justifikasi untuk menyampaikan ujaran kasar, sindiran tajam, atau bahkan penghinaan. Di sinilah terjadi dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Ketidakseimbangan antara keduanya menciptakan ruang publik digital yang rawan konflik dan gesekan antarindividu. Menurut Lovita *et al.* (2023), banyak pengguna yang terdorong untuk membuat konten kontroversial demi mendapatkan perhatian, tanpa memperhatikan etika atau dampak sosialnya. Sistem media sosial yang mengutamakan "like" dan "share" menciptakan tekanan psikologis untuk tampil menonjol, bahkan jika itu berarti melanggar norma. Alhasil, konten-konten yang tidak etis justru lebih mudah tersebar dan menjadi rujukan dalam interaksi digital. Faktor lain yang turut melatarbelakangi krisis etika ini adalah lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap perilaku komunikasi di ruang digital. Menurut Manasikana & Tunggal (2023), tidak semua pengguna memahami adanya batasan hukum dalam bermedia sosial, termasuk konsekuensi atas penyebaran ujaran kebencian dan fitnah. Di sisi lain, lemahnya implementasi kebijakan oleh platform atau pemerintah membuat perilaku tidak etis kerap dibiarkan. Ketidaktegasan ini menciptakan kesan bahwa ruang digital adalah wilayah bebas nilai, padahal dampaknya sangat nyata terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebelumnya, peneliti mengidentifikasi bahwa telah ada berbagai studi terdahulu yang membahas isu etika komunikasi di media sosial. Misalnya, Fahrimal (2018) menekankan pentingnya netiquette sebagai dasar interaksi sosial digital, khususnya di kalangan generasi milenial. Ia menunjukkan bahwa tanpa kesadaran etis, media sosial berpotensi menjadi ruang yang tidak sehat secara moral.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memetakan urgensi nilai sopan santun digital, namun masih bersifat umum dan belum menggambarkan kompleksitas krisis etika yang terjadi saat ini. Penelitian oleh Prabowo *et al.* (2021) menunjukkan bagaimana pelanggaran etika komunikasi muncul dalam pembelajaran daring, khususnya melalui WhatsApp. Mereka menemukan bahwa siswa sering kali tidak memahami batasan komunikasi yang sopan dalam ruang digital pendidikan. Studi ini relevan, namun cakupannya terbatas pada konteks pembelajaran dan belum mengeksplorasi dimensi sosial-budaya yang lebih luas yang terjadi dalam ruang publik digital seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Selanjutnya, Parlindungan *et al.* (2023) melakukan intervensi literasi digital pada siswa SMA untuk meningkatkan pemahaman tentang etika komunikasi. Hasilnya cukup positif, menunjukkan bahwa pendidikan literasi mampu menumbuhkan kesadaran etis. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada satu segmentasi usia dan belum mempertimbangkan perbedaan perilaku digital di antara kelompok usia lainnya, seperti pengguna dewasa atau komunitas daring lintas latar belakang sosial. Ulfa *et al.* (2024) memperkuat temuan sebelumnya dengan menegaskan bahwa moralitas menjadi elemen penting dalam interaksi digital. Mereka mengaitkan rendahnya nilai etika dengan meningkatnya konflik dan disintegrasi sosial di media sosial. Sementara itu, Aulia *et al.* (2023) secara khusus menganalisis konten TikTok dan menemukan bahwa penyimpangan etika berkomunikasi banyak ditiru oleh generasi muda. Kedua studi ini memperlihatkan dimensi krisis secara aktual, namun belum banyak menyentuh sisi regulasi, algoritma, atau peran platform digital.

Namun, peneliti mencermati bahwa adanya keterbatasan dalam studi-studi tersebut, terutama dalam pendekatannya yang cenderung deskriptif dan belum bersifat multidisipliner. Banyak studi masih berfokus pada aspek perilaku individu tanpa mempertimbangkan faktor struktural seperti desain algoritma media sosial, budaya viralitas, dan lemahnya sistem pengawasan etika digital. Padahal, krisis etika di ruang maya merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak aktor dan sistem. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung bersifat sektoral, hanya menyoroti pelajar, mahasiswa, atau pengguna muda. Padahal, perilaku komunikasi di media sosial merupakan fenomena lintas usia dan lintas kelas sosial yang melibatkan berbagai aktor, termasuk influencer, figur publik, dan masyarakat umum. Kurangnya penelitian komparatif lintas demografis membuat kita kehilangan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana krisis etika ini terbentuk dan menyebar dalam berbagai komunitas digital. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap yang ada dengan pendekatan yang lebih holistik. Kajian ini tidak hanya mengamati perilaku komunikasi pengguna, tetapi juga mempertimbangkan struktur sosial digital, pengaruh algoritma, norma budaya populer, dan peran regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemetaan menyeluruh terhadap krisis etika komunikasi di media sosial serta menawarkan solusi edukatif dan kebijakan yang lebih sistemik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif, guna memahami secara mendalam fenomena krisis etika komunikasi di media sosial dari perspektif struktur algoritmik platform, hingga kebijakan regulatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital terhadap konten di platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter). Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola komunikasi tidak etis, faktor pemicunya, dan relasi dengan sistem digital yang mendasarinya. Metode ini relevan untuk menggali realitas sosial yang kompleks dalam ruang digital, sebagaimana disarankan oleh Yin (2018) dalam studi kasus kualitatif dan Miles, *et al.* (2014) untuk analisis data tematik berbasis kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun pemahaman kontekstual yang utuh terhadap isu etika digital, serta merumuskan solusi edukatif dan kebijakan yang lebih sistemik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Konstruksi Krisis Etika dalam Interaksi Digital

Untuk memahami secara konkret bentuk-bentuk krisis etika komunikasi yang terjadi di media sosial, peneliti melakukan observasi digital terhadap konten yang beredar di tiga platform utama, yaitu TikTok, Instagram, dan X (Twitter). Observasi ini difokuskan pada konten yang sedang trending, interaksi pengguna, serta pola komunikasi yang muncul di ruang komentar dan fitur interaktif lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pelanggaran etika terjadi, dalam bentuk apa saja, serta apa faktor pemicunya. Hasil observasi dirangkum dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran visual terhadap dinamika krisis etika komunikasi yang berlangsung di ruang digital.

Tabel 1. Observasi Digital Etika Komunikasi di Tiga Platform Media Sosial

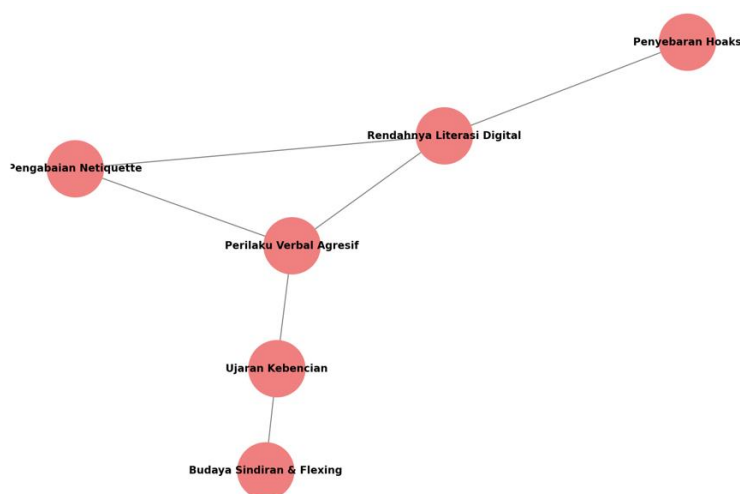
Platform	Konten	Pelanggaran Etika	Pola Interaksi	Indikator	Analisis
TikTok	Video prank & curhatan	Ejekan, penghinaan, pelecehan verbal	Komentar sarkastik, emoji tertawa, dukungan prank	>10.000 komentar dalam 24 jam	Konten viral mendorong pelanggaran privasi & perundungan
Instagram	Reels & story influencer	Body shaming, sindiran, flexing berlebihan	Polarisasi komentar, glorifikasi gaya hidup	>50% komentar berisi sindiran atau cibiran	Norma sopan santun tergerus oleh budaya citra & status
X (Twitter)	Thread isu sensitif (politik/agama)	Ujaran kebencian, doxing, ancaman fisik	Perdebatan tajam, tagar negatif, akun anonim aktif	>5.000 retweet pada thread konflik dalam 12 jam	Platform mendorong komunikasi agresif dan ideologis

Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap platform media sosial memiliki karakteristik pelanggaran etika komunikasi yang berbeda. TikTok mendorong viralitas konten yang sering mengandung pelecehan verbal, Instagram memperkuat budaya pencitraan yang mendorong sindiran dan komentar negatif, sedangkan X (Twitter) menjadi ruang paling rawan konflik karena sifat anonim dan cepatnya penyebaran informasi. Pola interaksi yang permisif terhadap ujaran kasar dan konten kontroversial mencerminkan lemahnya kontrol sosial digital. Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi dan pendidikan etika digital yang sistemik untuk mencegah krisis etika komunikasi semakin meluas di berbagai komunitas daring. Krisis etika komunikasi di media sosial terbentuk seiring dengan maraknya praktik komunikasi bebas tanpa filter moral yang memadai. Media sosial memberikan ruang ekspresi yang luas, namun sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Fenomena ini muncul karena rendahnya kesadaran pengguna akan dampak sosial dari kata-kata yang dilontarkan. Menurut Fahrimal (2018), generasi digital kerap mengabaikan norma etika dalam komunikasi daring, terutama saat berinteraksi secara anonim. Kebebasan berbicara akhirnya berubah menjadi kebebasan menyerang, menjadikan media sosial ladang konflik wacana yang merusak harmoni sosial. Salah satu bentuk nyata dari krisis etika adalah penyebaran hoaks yang masif dan sistematis. Informasi palsu menyebar dengan cepat karena pengguna jarang memverifikasi kebenaran sebelum membagikannya. Fatmawati *et al.* (2020) menegaskan bahwa rendahnya literasi digital menyebabkan pengguna mudah terjebak dalam arus informasi menyesatkan. Terlebih, algoritma media sosial cenderung memperkuat bias informasi dengan menyajikan konten serupa berulang kali.

Akibatnya, hoaks tidak hanya memicu kesalahpahaman, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi dan memperlebar jurang disinformasi di masyarakat digital. Perilaku verbal agresif juga menjadi indikasi kuat krisis etika yang mengakar di dunia maya. Bentuknya bisa berupa komentar kasar, hinaan, hingga ancaman, yang tersebar luas di kolom komentar berbagai platform. Menurut Juditha (2018), hal ini dipicu oleh persepsi keliru bahwa ruang digital bersifat bebas nilai dan tanpa konsekuensi. Situasi ini diperparah dengan adanya fitur anonimitas yang memperkuat keberanian pengguna untuk menyerang pihak lain tanpa tanggung jawab. Budaya saling serang ini menjauhkan pengguna dari semangat komunikasi yang seharusnya inklusif dan membangun. Lemahnya literasi digital menjadi penyebab utama memburuknya etika komunikasi di media sosial. Banyak pengguna hanya memahami aspek teknis penggunaan platform tanpa dibekali pengetahuan kritis tentang etika berkomunikasi. Zulaiha (2019) menyebutkan bahwa literasi digital idealnya mencakup kemampuan mengevaluasi, menilai, dan menyikapi informasi secara etis. Tanpa keterampilan ini, pengguna mudah terprovokasi, menyebarkan informasi palsu, dan terlibat dalam konflik verbal. Literasi yang dangkal membuat media sosial berubah menjadi arena pertikaian, bukan ruang dialog yang sehat dan produktif. Kurangnya pemahaman terhadap netiquette juga memperparah krisis ini. Netiquette sebagai panduan berperilaku sopan di internet—sering diabaikan, terutama oleh generasi muda yang tumbuh bersama teknologi. Gajula *et al.* (2024) menegaskan bahwa bahkan kalangan profesional pun masih sering melanggar etika digital karena minimnya pelatihan atau kesadaran akan pentingnya komunikasi yang santun. Ketika netiquette tidak dijadikan pedoman, interaksi digital menjadi bebas nilai, dan perilaku kasar menjadi hal lumrah. Ini berkontribusi terhadap menurunnya kualitas ruang publik digital secara keseluruhan. Pergeseran nilai sopan santun dalam ruang digital turut membentuk budaya komunikasi baru yang permisif terhadap pelanggaran etika. Media sosial menormalkan sindiran, cibiran, dan flexing sebagai gaya komunikasi sehari-hari. Menurut Rubin (2016), eksistensi di media sosial sering kali ditentukan oleh popularitas dan keterlibatan (engagement), bukan kualitas isi komunikasi. Akibatnya, pengguna terdorong untuk menampilkan diri secara ekstrem demi menarik perhatian, bahkan jika harus melanggar etika. Budaya ini secara perlahan mengikis norma sopan santun tradisional dan menciptakan generasi pengguna yang toleran terhadap perilaku komunikasi destruktif.

Tabel 2. Analisis Tematik Krisis Etika Komunikasi di Media Sosial

Tema	Bentuk Krisis	Platform Dominan	Penyebab Utama	Referensi
Ujaran Kebencian	Ejekan, fitnah, stereotip negatif	X (Twitter)	Anonimitas, isu politik/agama sensitif	Fahrimal (2018), Juditha (2018)
Penyebaran Hoaks	Informasi palsu tanpa verifikasi	Semua platform	Rendahnya literasi digital, algoritma bias	Fatmawati <i>et al.</i> (2020)
Perilaku Verbal Agresif	Komentar kasar, ancaman, sarkasme	TikTok, (Twitter)	X Persepsi ruang digital bebas nilai, anonim	Juditha (2018)
Budaya Sindiran & Flexing	Body shaming, sindiran terhadap gaya hidup	Instagram	Pencitraan, budaya popularitas (engagement)	Rubin (2016)
Rendahnya Literasi Digital	Tidak bisa menyikapi informasi secara etis	Semua platform	Fokus pada teknis, bukan etika	Zulaiha (2019)
Pengabaian Netiquette	Tidak sopan, tidak santun dalam interaksi digital	Semua platform	Minim pelatihan dan kesadaran	Gajula <i>et al.</i> (2024)



Gambar 1. Visualisasi Jaringan Tematik dan Kausal dari Krisis Etika Komunikasi di Media Sosial

Visualisasi jaringan tematik krisis etika komunikasi di media sosial menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran etika saling berkaitan dan membentuk pola sistemik yang saling memperkuat. Rendahnya literasi digital tampak menjadi simpul sentral yang berkontribusi pada penyebaran hoaks dan perilaku verbal agresif, yang kemudian mendorong munculnya ujaran kebencian. Sementara itu, pengabaian netiquette memperburuk dinamika komunikasi dengan mendorong ekspresi verbal yang kasar, dan budaya sindiran serta flexing di Instagram memperkuat normalisasi ejekan serta stereotip negatif. Hubungan antar tema ini mencerminkan bahwa krisis etika komunikasi bukanlah fenomena terisolasi, melainkan jaringan masalah yang kompleks dan saling terkait, yang menuntut pendekatan edukatif dan regulatif yang terpadu untuk menanganinya secara berkelanjutan. Konstruksi krisis etika dalam interaksi digital mencerminkan dinamika sosial yang semakin kompleks di era media sosial, di mana kebebasan berekspresi sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran etis dan tanggung jawab digital. Praktik komunikasi yang bebas nilai, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian tumbuh subur dalam lingkungan daring yang permisif dan minim kontrol. Fenomena ini diperparah oleh lemahnya literasi digital dan pengabaian terhadap netiquette yang seharusnya menjadi pedoman interaksi. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital, krisis etika ini tidak lagi dapat dianggap sebagai perilaku menyimpang individual semata, melainkan sebagai gejala sistemik yang perlu direspons secara kolektif melalui edukasi berkelanjutan dan kebijakan yang adaptif (Fahrimal, 2018; Zulaiha, 2019; Gajula *et al.*, 2024).

3.1.2 Pengaruh Struktur Digital dan Algoritma terhadap Perilaku Komunikasi

Desain algoritma media sosial terbukti menjadi arsitek utama dalam membentuk dinamika komunikasi digital. Dalam temuan observasi, TikTok, Instagram, dan X (Twitter) masing-masing menunjukkan pola pelanggaran etika yang khas, mulai dari pelecehan verbal, sindiran, hingga ujaran kebencian. Algoritma secara selektif menampilkan konten yang meningkatkan keterlibatan emosional pengguna. Hal ini sesuai dengan Napoli (2015) yang menyebut algoritma sebagai "gatekeeper" informasi. Penguatan terhadap konten ekstrem ini menjadikan algoritma sebagai fasilitator krisis etika digital karena memprioritaskan reaksi, bukan refleksi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa video prank di TikTok, flexing di Instagram, dan debat ideologis di X menjadi sarana utama penyebaran konten viral yang sering melanggar etika. Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya viralitas telah menciptakan insentif bagi pengguna untuk tampil mencolok, meskipun harus mengorbankan etika. Reviglio & Agosti (2020) menyebut ini sebagai bentuk "sovereignty of the algorithm", di mana nilai dan etika disubordinasikan oleh algoritma yang memonetisasi perhatian. Budaya viralitas yang permisif ini memperkuat siklus konten kasar dan destruktif.

Konstruksi budaya digital saat ini memberikan tekanan konstan untuk tampil menonjol demi mendapat validasi sosial. Temuan tentang dominasi sindiran dan glorifikasi gaya hidup di Instagram menunjukkan bagaimana eksistensi pengguna dibentuk oleh persepsi orang lain. Dalam kerangka attention economy, konten menjadi produk dan perhatian menjadi nilai tukar. Sylvia (2021) menegaskan bahwa tekanan untuk eksis di ruang digital menyebabkan pengguna lebih memilih konten ekstrem demi klik, like, atau share, daripada mempertahankan integritas komunikasi. Fitur-fitur seperti “like,” “retweet,” dan “share” telah menjadi alat validasi sosial yang memperkuat perilaku tidak etis. Dalam observasi, konten yang paling banyak direspons justru mengandung ejekan, sindiran, atau konflik sensitif. Gupta & Pandey (2023) menyebut fitur ini sebagai sistem penguatan psikologis yang membentuk ulang perilaku pengguna. Dengan kata lain, algoritma dan sistem interaksi sosial digital telah menciptakan siklus di mana konten destruktif dihargai dan didorong untuk direproduksi. Normalisasi terhadap perilaku kasar, sarkastik, dan bahkan ujaran kebencian di media sosial tampak jelas dalam temuan penelitian. TikTok memperlihatkan ribuan komentar sarkastik dalam waktu singkat, sementara X mendorong komunikasi agresif akibat anonimitas. Bhandari & Bimo (2022) menyebut proses ini sebagai “self-algorithmization,” di mana pengguna menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan selera algoritma. Hasilnya, komunikasi yang semula menyimpang menjadi norma baru, karena pengguna terbiasa dan tidak lagi menganggapnya sebagai pelanggaran etika. Temuan penelitian ini memperjelas bahwa krisis etika komunikasi bukanlah masalah personal semata, melainkan persoalan sistemik yang membutuhkan intervensi kolektif. Rendahnya literasi digital, pengabaian netiquette, dan dominasi algoritma memperparah situasi. Hurtado & Keune (2024) menyarankan pendekatan resistensi algoritmik dan pendidikan etika digital yang dapat membekali pengguna untuk bersikap kritis. Dalam konteks ini, desain ulang sistem algoritma dan sistem “engagement” harus mengarah pada keberpihakan terhadap konten edukatif dan konstruktif, bukan sekadar viral.

3.1.3 Urgensi Regulasi dan Literasi Etika Digital sebagai Solusi Sistemik

Kelemahan regulasi media sosial di Indonesia menjadi perhatian serius seiring meningkatnya pelanggaran etika komunikasi digital. Regulasi yang ada, seperti UU ITE, masih bersifat reaktif dan kurang responsif terhadap dinamika platform yang terus berubah. Akibatnya, pengawasan terhadap konten bermasalah, seperti ujaran kebencian atau hoaks, seringkali terlambat. Penegakan hukum pun dihambat oleh anonimnya pengguna dan cepatnya persebaran informasi digital (Putri *et al.*, 2024). Tanpa reformasi hukum yang adaptif dan progresif, ruang digital akan terus dibayangi oleh konflik sosial, disinformasi, dan budaya komunikasi destruktif. Integrasi antara regulasi hukum dan strategi pengawasan platform merupakan kunci untuk menciptakan ruang publik digital yang sehat. Pemerintah perlu berkolaborasi aktif dengan penyedia layanan digital untuk merancang mekanisme penghapusan konten bermasalah secara cepat dan adil. Hal ini mencakup transparansi algoritma, perlindungan pelapor, serta penetapan pedoman etika digital yang komprehensif. Sebagaimana dicontohkan dalam praktik Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan, media sosial bisa efektif bila dikelola transparan dan komunikatif (Ansyar & Junianto, 2023). Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya mengejar engagement, tetapi turut menjaga etika komunikasi. Algoritma saat ini sering kali memperkuat konten ekstrem yang memicu emosi, seperti prank agresif atau debat ideologis (Reviglio & Agosti, 2020). Tanpa koreksi algoritmik yang berpihak pada nilai edukatif, media sosial akan terus melanggengkan budaya viral yang merusak. Penelitian menyebut hal ini sebagai “sovereignty of the algorithm,” di mana nilai digantikan oleh performa klik dan reaksi (Napoli, 2015). Banyak pengguna tidak menyadari dampak sosial dari ujaran mereka, serta tidak terlatih dalam mengevaluasi informasi secara etis (Zulaiha, 2019). Dalam hal ini, peran pendidikan menjadi vital. Pemerintah, sekolah, dan komunitas daring harus mengembangkan kurikulum literasi digital yang mencakup netiquette, keamanan digital, dan kesadaran algoritmik. Hanya dengan bekal ini masyarakat dapat berinteraksi secara sehat dan bertanggung jawab di dunia maya.

Selain itu, edukasi harus menasar pemahaman pengguna terhadap sistem sosial media itu sendiri. Fitur like, share, dan retweet berfungsi sebagai alat validasi sosial, namun dapat menjadi perangkap etika bila tidak dikritisi. Penelitian Gupta & Pandey (2023) menunjukkan bahwa sistem ini membentuk ulang perilaku pengguna, mendorong ekspresi ekstrem demi keterlibatan. Oleh karena itu, reformasi sistem interaksi dalam platform menjadi bagian penting dari strategi integratif pengawasan media sosial yang etis. Membangun ekosistem digital yang etis tidak bisa bergantung pada satu pihak. Pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan, menyusun regulasi adaptif, dan mendesain sistem pengawasan kolaboratif. Sebagaimana ditegaskan oleh Hurtado & Keune (2024), pendekatan resistensi algoritmik dan pendidikan etika digital perlu didorong agar ruang publik digital menjadi inklusif, adil, dan bermartabat. Dengan strategi integratif ini, Indonesia dapat membangun ruang digital yang tidak hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab.

3.2 Pembahasan

Pembahasan mengenai produk yang berfokus pada pencegahan kebutaan akibat Retinopati Diabetik dengan memanfaatkan teknologi analisis foto Fundus berbasis AI dan pemantauan kadar gula darah mencakup berbagai aspek yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi kesehatan saat ini. Retinopati Diabetik adalah salah satu komplikasi diabetes yang dapat menyebabkan kebutaan jika tidak terdeteksi lebih awal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi audiens yang tepat yang dapat diuntungkan dengan inovasi ini. Berdasarkan studi dan perkembangan terkini dalam teknologi medis, produk ini sangat relevan bagi penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2, yang merupakan kelompok yang paling berisiko terhadap Retinopati Diabetik (Aulia *et al.*, 2023). Mengingat prevalensi diabetes yang tinggi secara global, produk ini memberikan solusi untuk mendeteksi gejala Retinopati Diabetik lebih awal melalui analisis foto Fundus yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), yang memungkinkan pemantauan kondisi mata tanpa perlu peralatan medis yang rumit. Selain itu, produk ini juga sangat bermanfaat bagi dokter spesialis mata dan endokrinolog, yang menangani pasien diabetes. Dengan alat ini, mereka dapat lebih mudah memonitor kondisi retina pasien dan memberikan diagnosa lebih cepat serta lebih tepat (Gajula *et al.*, 2024). Integrasi pemantauan gula darah dalam produk ini juga sangat penting, karena kestabilan gula darah adalah faktor kunci dalam mencegah perkembangan Retinopati Diabetik. Oleh karena itu, produk ini memberikan nilai tambah bagi para profesional medis yang memerlukan teknologi yang dapat membantu mereka dalam memberikan perawatan yang lebih efektif.

Individu dengan riwayat keluarga diabetes juga menjadi target penting bagi produk ini. Meskipun mereka belum terdiagnosis diabetes, kelompok ini lebih rentan terhadap penyakit tersebut, dan produk ini memungkinkan mereka untuk melakukan deteksi dini terhadap Retinopati Diabetik, sekaligus menjaga gula darah tetap stabil (Fahrimal, 2018). Teknologi ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengurangi risiko komplikasi mata sebelum penyakit berkembang lebih jauh. Sebagai contoh, banyak keluarga yang belum menyadari pentingnya deteksi dini terhadap Retinopati Diabetik, padahal pencegahan sejak dini dapat mengurangi angka kebutaan secara signifikan. Bagi pasien yang telah didiagnosis dengan Retinopati Diabetik tahap awal, produk ini memberikan solusi yang sangat penting dalam pemantauan rutin. Retinopati Diabetik sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak pasien tidak tahu bahwa kondisi mereka semakin buruk. Dengan menggunakan foto Fundus yang dianalisis oleh AI, pasien dapat mendeteksi perubahan dalam retina mereka lebih cepat, sehingga dapat mencegah kerusakan lebih lanjut pada mata (Bhandari & Bimo, 2022). Pemantauan gula darah juga memberikan mereka cara untuk mengendalikan faktor utama yang mempengaruhi progresi penyakit ini. Di sisi lain, produk ini juga memberikan manfaat besar bagi penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, yang menangani banyak penderita diabetes. Dengan produk ini, mereka bisa melakukan pemeriksaan retina secara lebih terjangkau dan efisien tanpa memerlukan peralatan medis mahal dan rumit. Selain itu, produk ini dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan dalam upaya deteksi dini dan pencegahan Retinopati Diabetik (Napoli, 2015).

Salah satu keuntungan lain dari produk ini adalah kemampuannya untuk menjangkau daerah-daerah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan, di mana pemeriksaan mata rutin untuk diabetes tidak selalu tersedia. Dengan menggunakan perangkat yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis AI, individu di daerah yang kurang terlayani bisa memantau kondisi mata mereka tanpa harus mengunjungi fasilitas medis yang jauh atau mahal (Putri *et al.*, 2024). Produk ini memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan efektif dalam deteksi dini, yang esensial untuk mengurangi angka kebutaan akibat diabetes. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan oleh produk ini, seperti pemantauan gula darah yang real-time dan analisis foto Fundus menggunakan teknologi AI, keluarga dan pengasuh pasien diabetes juga menjadi audiens yang sangat penting. Mereka memerlukan alat yang mudah digunakan untuk memantau kesehatan mata pasien mereka dan menjaga kestabilan gula darah secara teratur. Produk ini memberikan mereka ketenangan pikiran, karena bisa membantu mereka memonitor kondisi pasien tanpa perlu datang ke dokter setiap saat (Ihsani & Febriyanti, 2021). Kesimpulannya, produk ini dirancang untuk memberikan solusi yang efektif dan efisien bagi berbagai audiens yang rentan terhadap Retinopati Diabetik. Dengan menggabungkan teknologi canggih untuk deteksi dini dan pemantauan gula darah, produk ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes, tetapi juga menyediakan alat bantu yang sangat berguna bagi tenaga medis dan keluarga pengasuh. Teknologi seperti ini penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan terjangkau, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kebutaan akibat diabetes secara signifikan.

4. Kesimpulan

Krisis etika komunikasi di media sosial Indonesia merupakan fenomena sistemik yang dipicu oleh lemahnya literasi digital, pengabaian netiquette, serta dominasi algoritma yang memperkuat konten ekstrem dan emosional. Temuan ini mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya yang umumnya bersifat sektoral dan deskriptif, dengan menawarkan pendekatan multidisipliner yang mencakup analisis terhadap struktur platform dan kelemahan regulasi hukum. Desain algoritmik terbukti tidak netral; ia mendorong adaptasi perilaku menyimpang demi keterlibatan sosial (*engagement*), menciptakan siklus pelanggaran etika yang berulang. Karena itu, penanganan krisis ini membutuhkan kolaborasi antarsektor antara pemerintah, penyedia platform, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan pengawasan yang adaptif dan edukatif. Konsep resistensi algoritmik dan literasi etika digital ditawarkan sebagai strategi kunci untuk membentuk ruang digital yang reflektif, inklusif, dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan integratif ini, ekosistem komunikasi daring yang etis dapat terwujud.

5. Daftar Pustaka

- Ansyar, L., & Junianto, J. (2023). Pemanfaatan media sosial sebagai media publikasi oleh Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Blantika Multidisciplinary Journal*, 2(2), 158–164. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.84>.
- Aulia, K., Wardinasahira, P., Cintani, N., Nisrina, N., & Sholihatini, E. (2023). Dampak penggunaan teknologi internet melalui TikTok akun gosip terhadap etika berbahasa. *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(2), 146–155. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i2.230>.

- Bhandari, A., & Bimo, S. (2022). Why's everyone on TikTok now? The algorithmized self and the future of self-making on social media. *Social media+ society*, 8(1), 20563051221086241. <https://doi.org/10.1177/20563051221086241>.
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika jejaring sosial generasi milenial dalam media sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82>.
- Fatmawati, S., Salzabila, R., & Rizkitama, G. (2020). Hoax analysis on social media corpus to develop “kapak hoaks (hoax axe)” model: A study on critical discourse analysis. *E-Structural*, 3(01), 69–81. <https://doi.org/10.33633/es.v3i01.4094>.
- Gajula, M., Pande, B., Gajula, B., & Hariba, S. (2024). Netiquette and social media engagement of doctors: A renaissance in health-care delivery. *Asian Journal of Medical Sciences*, 15(5), 147–151. <https://doi.org/10.3126/ajms.v15i5.62469>.
- Gupta, K., & Pandey, R. (2023). Emerging design trends in social media and its impact on business efficiency and growth in India. *Shodhkosha Journal of Visual and Performing Arts*, 4(2SE). <https://doi.org/10.29121/shodhkosha.v4.i2se.2023.455>.
- Hurtado, S., & Keune, A. (2024). Social media as a space for youth's algorithmic resistance. *ICLS 2024*. <https://doi.org/10.22318/icls2024.616062>.
- Ihsani, A., & Febriyanti, N. (2021). Etika komunikasi sebagai kontrol kesalahan virtual dalam perilaku bermedia masyarakat di era digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.512>.
- Juditha, C. (2018). Hoax communication interactivity in social media and anticipation (interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya). *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.
- Lovita, L., Dzakiyah, U., Angelika, R., & Natasya, Y. (2023). Analisis pengaruh media sosial melalui aplikasi digital TikTok sebagai media persuasif terhadap penerapan etika berkomunikasi pada mahasiswa. *Edusaintek Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 10(1), 181–192. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v10i1.653>.
- Manasikana, R., & Tunggal, A. (2023). Edukasi etika bermedia sosial pada mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. *Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 461. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i4.1611>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Napoli, P. M. (2015). Social media and the public interest: Governance of news platforms in the realm of individual and algorithmic gatekeepers. *Telecommunications Policy*, 39(9), 751–760. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2014.12.003>.
- Parlindungan, D., Haloho, H., Silvian, V., Syabanera, N., Cahyadi, L., Eugenia, J., ... & Fernando, E. (2023). Literasi digital untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Paskalis Jakarta mengenai

- etika komunikasi di media sosial. *Dharma Sevanam Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 201–211. <https://doi.org/10.53977/sjpkm.v2i2.1072>.
- Prabowo, E., Fajrie, N., & Setiawan, D. (2021). Etika komunikasi siswa dalam pembelajaran daring melalui aplikasi WhatsApp. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 5(3), 429. <https://doi.org/10.23887/jppp.v5i3.38191>.
- Putri, L., Pebrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas pengawasan media sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pencegahan kampanye propaganda. *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>.
- Reviglio, U., & Agosti, C. (2020). Thinking outside the black-box: The case for “algorithmic sovereignty” in social media. *Social media+ society*, 6(2), 2056305120915613.. <https://doi.org/10.1177/2056305120915613>.
- Rubin, V. (2016). Deception detection and rumor debunking for social media. In H. Yan (Ed.), *The SAGE handbook of social media research methods* (pp. 342–363). <https://doi.org/10.4135/9781473983847.n21>.
- Sylvia, J. (2021). An affirmative approach to teaching critical data studies. *Journalism and Media*, 2(4), 641–656. <https://doi.org/10.3390/journalmedia2040038>.
- Ulfa, A., Jayus, M., Sofiana, A., & Febriani, E. (2024). Berkomunikasi melalui media sosial berbasis nilai moralitas. *Education Achievement Journal of Science and Research*, 1077–1089. <https://doi.org/10.51178/jsr.v5i3.2157>.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zonyfar, C., Maharina, M., Sihabudin, S., & Ahmad, K. (2022). Literasi digital: Penguatan etika dan interaksi siswa di media sosial. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(2), 1426. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i2.7274>.
- Zulaiha, S. (2019). Edukasi literasi informasi bagi anak dan remaja untuk meminimalisir penyalahgunaan media jejaring sosial. *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 15(2), 116–125. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13469>.